

Available online at Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah>
Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 26 (2), 2022, 146-164

Gerakan Islam: Problem Ideologi Radikal, Global Jihad dan Terorisme Keagamaan

Tasman
tasman@uinjkt.ac.id
Aisyah
aisyah@aurora@gmail.com

Abstrak

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, peta dunia ditandai dengan gerakan Islam radikal. Meskipun agama bukan satu-satunya faktor, gerakan tersebut jelas banyak dipengaruhi (paham) agama. Misalnya tragedi serangan atas WTC 11 September 2001. Aksi terorisme ini dilancarkan oleh fundamentalisme (Islam) radikal yang menghalalkan segala cara untuk melawan kepentingan Amerika Serikat, Barat, dan modernitas beserta nilai-nilai yang dibawanya (HAM, demokrasi, liberalisme, dan lain-lain). Di Indonesia sendiri, kita juga melihat berbagai fenomena keagamaan yang seperti membenarkan asumsi bahwa fundamentalisme memang sedang mengukuhkan keberadaannya, fundamentalisme radikal sedang bangkit. Misalnya terjadi peristiwa peledakan bom Bali dan bom Mariot di Jakarta. Gerakan radikal mendapat perhatian utama di kalangan pengamat politik global sebagaimana dilansir oleh Karen Armstrong yang menyatakan: bahwa di abad 20 (dan berlanjut di abad 21) fundamentalisme sedang bangkit di setiap agama-agama besar (major religion) dan merupakan se bentuk revolusi yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia melawan modernitas dan masyarakat sekular. Persoalannya adalah apakah gerakan radikal tersebut sesuai dengan karakter dan watak Islam? Jawaban terhadap pertanyaan ini tentu saja tidak mudah apalagi menempelkan istilah radikal kepada agama tertentu. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengurai pengertian Gerakan Islam:, radikalisme, jihad, dan terorisme berbasis Agama. Kajian ini akan memfokuskan pada fenomena gerakan Islam kontemporer, pasca tahun 2000.

Kata Kunci: gerakan Islam, ideologi radikal, global jihad, terorisme

Abstract

In recent decades, the world map has been marked by radical Islamic movements. Although religion is not the only factor, the movement is clearly influenced by religion (religious ideology). For example, the tragedy of the September 11, 2001 attacks on the World Trade Center. This act of terrorism was carried out by radical (Islamic) fundamentalism which justifies any means to oppose the interests of the United States, the West, and modernity and the values it brings (human rights, democracy, liberalism, and others). In Indonesia itself, we also see religious phenomena that seem to justify the assumption that fundamentalism is indeed confirming its existence, radical fundamentalism is on the rise. For example, the Bali bombings and the Mariot bombings occurred in Jakarta. Radical movements have received major attention among observers of global politics as reported by Karen Armstrong who stated: that in the 20th century (and continues in the 21st century) fundamentalism is rising in every major religion and is a form of revolution that is widespread in the world all over the world against modernity and secular society. The problem is whether the radical movement is in accordance with the character and character of Islam? The answer to this question is of course not easy, let alone attaching the term radical to a particular religion. Therefore, this paper tries to decipher the meaning of the Islamic Movement: radicalism, jihad, and religion-based terrorism. This study will focus on the phenomenon of the contemporary Islamic movement, post 2000.

Keywords: Islamic movement, radical ideology, global jihad, terrorism

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/dakwah.v26i2.29322>

Pendahuluan

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, peta dunia sedang ditandai dengan gerakan Islam radikal. Meskipun gerakan tersebut bukan menjadikan agama satu-satunya faktor, namun tampak jelas pertimbangan religiusitas dalam gerakan sedikit banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh agama. Misalnya peristiwa diruntuhkannya *World Trade Center* 9 September 2001. Setekah peristiwa itu, segera menempatkan umat Islam dan

kaum muslim dalam posisi sulit karena para pelakunya dianggap berasal dari kelompok fundamentalisme radikal yang melancarkan suatu bentuk terorisme yang menghalalkan segala cara untuk melawan kepentingan Amerika Serikat, Barat, dan modernitas beserta nilai-nilai yang dibawanya (HAM, demokrasi, liberalisme, dan lain-lain).

Di Indonesia sendiri, kita juga melihat fenomena-fenomena keagamaan yang seperti membenarkan

asumsi bahwa fundamentalisme memang sedang mengukuhkan keberadaannya, fun-damentalisme radikal sedang bangkit. Contoh terjadi peristiwa peledakan bom Bali dan bom *Mariot* di Jakarta. Gerakan radikal mendapat perhatian utama di kalangan pengamat politik global sebagaimana dilansir oleh Karen Armstrong yang menyatakan: bahwa di abad 20 (dan berlanjut di abad 21) fundamentalisme sedang bangkit di setiap agama-agama besar (*major religion*) dan merupakan sebetulnya revolusi yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia melawan modernitas dan masyarakat sekular.¹ Persoalannya adalah apakah gerakan radikal tersebut sesuai dengan karakter dan watak Islam? Jawaban terhadap pertanyaan ini tentu saja tidak mudah apalagi menempelkan istilah radikal kepada agama tertentu. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengurai pengertian *Gerakan Islam*;, *radikalisme*, *jihād*, dan *terorisme berbasis Agama*. Kajian ini akan memfokuskan pada fenomena gerakan Islam kontemporer, pasca tahun 2000.

Gerakan Sosial dan Gerakan Islam: Suatu Pendekatan Teoritik

Kata gerakan secara etimologis berarti gerak, dalam bahasa Arab disebut *harakah*, dan dalam bahasa Inggris yaitu *motion*, yaitu perpindahan dari suatu tempat menuju tempat lainnya. Dalam tradisi klasik Islam, kata *harakah* adalah terminologi yang diwacanakan dalam perdebatan filsafat dan ilmu kalam (teologi Islam). Kata ini mengalami perkembangan makna secara terminologis, yakni pada awal

abad ke-20, yang berarti gerakan sosial (*Social movement*) yang digunakan untuk merujuk pada suatu organisasi gerakan yang berkembang di dunia Islam.²

Secara umum, gerakan radikal dalam ilmu sosial dimasukkan ke dalam gerakan sosial. Gerakan sosial adalah suatu tindakan kolektif terorganisir dan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk mendorong perubahan dari suatu kondisi yang dianggap merugikan menuju kondisi yang diyakini lebih baik dari sebelumnya atau menolak perubahan yang dilakukan kelompok sosial lainnya. Di dalamnya terdapat unsur-unsur perlawanan dari kelompok yang merasa dirugikan (*protagonist*) melawan kelompok-kelompok sosial lain yang dianggap merugikan kelompok sosial lainnya (*antagonist*). Di samping dua kelompok sosial tersebut ada juga kelompok sosial lain yang mengambil posisi tidak pada kelompok *protagonist* maupun *antagonist*, yaitu kelompok *bystander*. Kelompok ini sangat cair, tidak terikat secara ketat ke dalam salah satu kelompok *protagonist* maupun *antagonist*. Kelompok ini akan masuk atau keluar secara rasional ke dalam salah satu kelompok *protagonist* atau *antagonist* tergantung kelompok mana yang paling menguntungkan untuk dirinya.³

Dalam pandangan teori struktural fungsional (*fungsionalisme struktural*) yang dikembangkan oleh Talcott Parson, bahwa masyarakat merupakan satu kesatuan utuh diikat oleh suatu norma atau nilai tertentu yang dianut oleh masyarakatnya yang

dibentuk berdasarkan kontrak sosial. Diandaikan dalam teori ini bahwa masyarakat akan selalu sinergi dan harmoni, masing-masing element yang ada dalam masyarakat selalu ter-integrasi (*integration*) ke dalam sistem. Seluruh element yang ada di dalamnya mentaati dan mematuhi kontrak sosial yang telah dibentuk. Jika ada yang melanggar kesepakatan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Sangsi dalam hal ini berfungsi sebagai perbaikan (rehabilitasi) kembali masyarakat yang menyimpang agar kembali lagi ke dalam struktur. Dalam istilah fungsionalisme struktural kelompok yang keluar dari sistem ini disebut penyimpangan (*deviance*). Oleh karena itu, gerakan sosial yang berbau keagamaan maupun tidak dipandang sebagai suatu gerakan yang menyimpang dari sistem. Hal itu, dikarenakan sikap, pandangan maupun perilaku sosialnya berbeda dengan arus utama (*mainstream*) masyarakat.⁴

Dalam perspetif social movement komponen-komponen penting dalam gerakan sosial terdiri dari pelaku, organisasi, kesinambungan gerakan, tujuan serta ideologi dan strategi gerakan yang digunakan. Ideologi inilah yang menjadi perekat untuk mengikat individu-individu ke dalam suatu kelompok gerakan sosial dan menjadi landasan utama dari setiap gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok. Meskipun demikian, ideologi terkadang, tidak selalu menentukan strategi dan bentuk gerakan yang dipilih oleh suatu kelompok. Kelompok-kelompok

gerakan struk-tural, misalnya, cenderung memilih strategi pengerahan massa yang masif untuk berdemonstrasi. Dalam aksi ini tidak jarang terjadi bentrokan fisik dengan aparat keamanan atau kelompok lain hingga menimbulkan kerugian material, luka-luka ringan dan berat bahkan korban jiwa. Sementara, kelompok-kelompok gerakan kultural, cenderung memilih strategi lobi dan pernyataan sikap. Memang tidak harus selalu demikian, namun yang pasti adalah warna ideologi sering menunjukkan karakter gerakan suatu kelompok apapun pilihan strategi dan bentuk gerakannya. Sehingga tidak mengherankan jika sering terjadi kelompok gerakan yang berideologi sama tetapi saling bertentangan. Begitu juga sebaliknya, tidak jarang kelompok gerakan yang berbeda secara ideologi, tapi bergerak bersama.⁵

Gerakan Islam dalam tulisan ini dimaknai sebagai sebagai salah satu varian dari gerakan sosial, yang merupakan suatu tindakan bersama sekelompok orang Islam yang menganggap ajaran “Islam” sebagai sumber nilai dari dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam melakukan gerakan. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya dipahami sebagai doktrin yang hanya mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi lebih jauh lagi juga dipahami sebagai landasan etika sosial dan politik. Identitas Islam inilah yang kemudian melandasi visi politik dan cita-cita kolektif yang hendak dicapai. Partisipasi seorang muslim dalam suatu gerakan Islam terkait dengan persepsi

positif tentang kemenyatuan agama dan masyarakat, agama dan negara; atau masyarakat dan negara harus dibangun atas dasar syariat Islam. Persepsi dan kepercayaan ini merupakan frame atau pembentuk bagi seorang Muslim berpartisipasi dalam sebuah gerakan Islam. "Frame" adalah "seperangkat keyakinan yang berorientasi aksi yang mendorong dan membenarkan gerakan sosial".⁶ Dalam perspektif psikologi sosial, frame meliputi tiga hal: perasaan tidak adil atas perlakuan terhadap suatu kelompok partisipan, identitas kelompok yang mendefinisikan "kita" sebagai korban ketidakadilan oleh kelompok sosial lain atas penguasa, dan agensi.⁷

Problem Ideologi Radikal

Kebangkitan Agama dan demokrasi merupakan dua fenomena yang paling menarik dalam dua dasawarsa terakhir ini. Di beberapa negara, gerakan-gerakan kebangkitan agama berjalan seiring dan terkadang memperkuat sistem politik ke arah yang lebih demokratis. Sementara di wilayah-wilayah lain, antara agama dan demokrasi saling bertentangan. Gerakan agama bangkit menawarkan Islam sebagai ideologi alternatif berhadapan dengan ideologi demokrasi yang sudah mapan dipraktekkan di negara-negara modern. Pertentangan sistem demokrasi dengan Islam inilah kemudian menarik perhatian ilmuwan politik Samuel P. Huntington dalam melihat hubungan masyarakat dunia di masa depan. Ia meramalkan akan terjadi perbenturan peradaban antara

Barat dengan Islam.⁸ Klaim Huntington ini bukan tanpa alasan, ia memberikan bukti bukti historis dengan merunut sejarah perjalanan bangsa bangsa di muka bumi. Tidak sedikit pula ilmuwan yang menolaknya bahkan alih-alih menyuurkan perpecahan lebih baik merajut perdamaian untuk masa depan dunia yang lebih baik. Meskipun demikian, tesis Huntington telah menarik perhatian para ilmuwan. Sejauh ini sudah ada beberapa studi tentang bangkitnya gerakan Islam yang dilakukan oleh para ahli, namun studi mengenai gerakan Islam radikal masih relatif terbatas.

Kajian yang lebih umum ditulis oleh Ira Lapidus dalam karyanya, *Islam, politics, and Social Movements* (1988). Dalam pandangan Lapidus, dalam banyak hal yang menyebabkan munculnya gerakan Islam secara umum bersumber dari kultur politik Islam. Lapidus meyakini bahwa dalam tradisi Islam tidak dikenal adanya pemisahan negara dan agama, dan Islam yang dibangun Muhammad di Madinah bukan hanya institusi keagamaan tetapi juga lembaga politik. Warisan tradisi masa awal Islam inilah yang menjadi contoh untuk me-wujudkan negara Islam pada masa sekarang ini.⁹

John L. Esposito, dalam bukunya *The Islamic Treat: Myth or Reality* (1992) memberikan beberapa landasan ideologis bangkitnya gerakan Islam, yaitu *pertama*, para aktivis Muslim berpendapat bahwa masyarakat Muslim sekarang ini telah terperosok ke dalam peradaban Barat dan telah terpisah dari jalan yang lurus, maka jalan keluarnya adalah dengan

cara kembali ke Islam baik dalam kehidupan pribadi maupun umum. *Kedua*, bagi masyarakat Muslim, Islam merupakan jalan yang menyeluruh seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang tercermin dalam teladan nabi Muhammad sebagai contoh negara komunitas Muslim pertama. Dengan demikian, peng-aktifan kembali pemerintah dan masyarakat Muslim memerlukan penerapan kembali hukum Islam, cetak biru dari negara dan masyarakat yang Islami dan berkeadilan sosial. *Ketiga*, meskipun kelompok-kelompok ini mengutuk westernisasi dan sekularisasi tetapi modernisasi dibolehkan. Sains dan teknologi diterima, namun langkah, arah dan tingkat perubahan harus mengikuti keyakinan dan nilai-nilai Islam dengan tujuan untuk melindunginya dari penetrasi dan ketergantungan yang berlebihan pada nilai-nilai Barat. *Keempat*, karena peraturan-peraturan sosial yang banyak berkembang pada masyarakat Muslim sebagai warisan kolonialisme, juga harus ditolak. Sebagai gantinya, masyarakat Muslim harus menegakkan hukum Islam sebagai satu-satunya sumber hukum yang diterima. *Kelima*, mereka berkeyakinan bahwa upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat Muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan aspek perorganisasian ataupun pembentukan sebuah kelompok yang solid. Meskipun terkadang berskala kecil, kelompok yang dibangun biasanya secara ideologis berkarakter kuat, dengan mengandalkan sebagian anggota kelompok yang lebih terdidik dan

terlatih. Dengan cara seperti inilah, mereka dapat meyakinkan para pengikutnya untuk menjalankan tugas suci keagamaan dalam rangka menegakkan hukum Islam.¹⁰

Ringkasnya, dalam konsep Islam terdapat doktrin bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Politik Islam dalam konteks aktifis gerakan dipandang sebagai penggabungan "agama dan politik". Dalam istilah gerakan Islam, Islam adalah *din wa daulah* (agama dan negara). Ilmuwan politik menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh. Seluruh sikap dan cara pandang muslim terhadap dunia berorientasi pada syariat (hukum) Islam yang bersifat total. Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik, hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan seorang muslim dalam suatu pergerakan Islam seringkali terkait dengan persepsi tentang keniscayaan kemenyatuan agama dan masyarakat, agama dan negara; atau masyarakat dan negara harus dibangun atas dasar nilai-nilai Islam.

Sementara kajian yang lebih komprehensif mengenai kebangkitan gerakan Islam dilakukan oleh Saiful Muzani pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, dalam tulisannya *Syariat Islam Bergerak: Budaya, Psikologi, Pilihan Rasional, Organisasi, struktur Kesempatan Politik, dan Gerakan Islam Indonesia* (2002).¹¹ Pada level ini Saiful Muzani dengan menggunakan teori Ira Lapidus¹², Keddie, Nagata, Lubeck, dan Kuzman, ia menjelaskan bahwa gerakan Islam yang ada dapat

ditimbulkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor kultur politik Islam sebagai pendorong munculnya gerakan Islam (Ira Lapidus). *Kedua*, melemahnya pengaruh nilai-nilai Islam akibat terjadinya perubahan sosial yang cepat, modernisasi, dan sekularisasi (Keddie). *Ketiga*, faktor konflik etnik dapat pula menyebabkan gerakan Islam. Tumpang tindih antara sentimen keagamaan dan sentimen etnik dalam masyarakat Muslim berpotensi menyulut gerakan Islam, seperti di Bosnia (Nagata). *Keempat*, faktor sosial lain yang berpotensi terhadap bangkitnya gerakan Islam adalah konflik kelas sosial. Gerakan Islam dipandang sebagai bentuk artikulasi kepentingan kelas bawah melawan kelas atas dalam masyarakat Muslim. *Kelima*, faktor kesempatan politik, adanya peluang untuk menang jika melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan,¹³ ada persepsi bahwa negara dalam keadaan lemah, lebih terbuka terhadap kekuatan dari masyarakat seperi yang terjadi pada Revolusi Iran.

Adapun jalan untuk mewujudkan cita cita tersebut menurut pengakuan pengikutnya, dengan cara menjalankan Islam dengan *kaffah*—menegakkan *amar ma'ruf wa nahyi munkar*, menyeluruh, konsekwen dan tegas, bila perlu dengan jalan kekerasan, yang dalam teori gerakan sosial disebut dengan radikalisme.

Radikalisme Agama

Istilah radikalisme sendiri sebenarnya bukan konsep asing dalam ilmu sosial. Dalam buku *Open Society*

and its Enemy, Karl Popper menjelaskan sifat dasar dari radikalisme. Popper menyatakan bahwa Karl Marx seringkali menolak gagasan Plato dalam cara pandanganya terhadap realitas. Tetapi ada satu element penting yang tidak ditentang oleh Marx, yaitu sikap radikalisme yang tidak suka berkopromi. Lebih jauh Popper menjelaskan bahwa dalam radikalisme terdapat pengandaian bahwa, seseorang yang ingin mewujudkan masyarakat yang baik, ia harus menghancurkan akar kejahatan sosial. Bahwa tak ada yang perlu dilakukan selain pembasmian sistem sosial yang bobrok secara menyeluruh, jika kita ingin membawa kebaikan ke dunia. Plato dan Marx, menurut Popper bermimpi tentang revolusi yang akan mengubah secara radikal keseluruhan dunia sosial.¹⁴

Dalam pandangan lainnya Sejarawan Sartono Kartodirjo, misalnya memakai istilah 'radikalisme' agama untuk menggambarkan gerakan protes (petani) yang menggunakan simbol agama dalam menolak seluruh aturan dan tatanan yang ada. Kata 'radikal' digunakan sebagai indikator sikap penolakan total terhadap seluruh kondisi yang sedang berlangsung.¹⁵

Sementara itu, Horace M. Kallen dalam buku 'Radikalisme' menguraikan radikalisme sosial paling tidak dicirikan oleh tiga kecendrungan umum. Pertama, radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang biasanya muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau perlawanan. Permasalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau

nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap kondisi yang ditolak. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, tetapi terus berupaya menggantikan tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan lain. Kaum radikal berusaha untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Sesuai dengan pengertian kata '*radic*', sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar. Ketiga, keyakinan kaum radikal yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama menafikan sistem lain yang akan diganti.¹⁶

Banyak pemerhati gerakan sosial keagamaan menjelaskan adanya kedekatan sifat antara fundamentalisme dengan radikalisme. Dalam pandangan Marty dan Appleby yang dikutip oleh Tarmizi Taher dalam buku "Radikalisme agama" dijelaskan bahwa fundamentalisme merupakan sikap yang berjuang (*fight*) melawan kelompok yang mengancam eksistensi mereka dan identitas yang menjadi perjuangan hidup. Perjuangan mereka ditujukan untuk menegakkan cita-cita yang mencakup persoalan hidup secara umum, seperti keluarga atau institusi sosial lain. Kaum fundamentalis berjuang dengan (*fight with*) kerangka nilai atau identitas tertentu yang diambil dari warisan masa lalu maupun konstruksi baru. Untuk itu mereka juga berjuang melawan (*fight against*) musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang. Terakhir kaum

fundamentalis juga dicirikan oleh perjuangan atas nama (*fight under*) Tuhan atau ide-ide lain.¹⁷

Berpijak pada teori ini, maraknya gerakan radikal yang dilakukan oleh sekelompok muslim secara langsung atau tidak langsung meneguhkan citra sempit tentang Islam sebagai agama yang bersifat radikal dan intoleran. Kesan ini sulit dibantah karena gelombang radikalisme Islam telah menjadi bagian penting dari rentetan kekisruhan politik sejak pertengahan abad ke-20. Bahkan dalam sejarah Islam, pada abad-abad sebelumnya, radikalisme dan fundamentalisme Islam juga telah muncul sebagaimana yang ditunjukkan oleh gerakan politik-keagamaan yang dipimpin oleh Usman Dan Fodio di Afrika, Wahhabiyah di Semenanjung Arab, dan jauh sebelumnya oleh kelompok Khawarij pada masa Khulafa Ar-Rasyidin¹⁸

Dalam khasanah Islam, gerakan keagamaan yang bertujuan menerapkan nilai-nilai agama secara menyeluruh ini ditandai dengan kelompok yang disebut dengan *salafiyah*. Suatu istilah yang dekat dengan fundamentalis atau dalam istilah Arab, disebut juga *usuliyun*.¹⁹ Gerakan *salafi* ini dimotori oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab, seorang pemurni dari Hijaz, Arab Saudi pada akhir abad ke-19. Wahabisme dapat diklasifikasikan sebagai kelompok, fundamentalis-skripturalis, yang menekankan pentingnya kembali kepada sumber Islam yang sejati, yaitu Qur'an dan Sunnah.²⁰ Menurut paham ini, generasi awal Islam merupakan

generasi yang saleh (*salaf al-saleh*), sementara generasi yang terkemudian banyak melakukan penyimpangan agama (*bid'ah*).

Semangat salafi terletak pada keinginan untuk mengembalikan pemahaman dan praktik keagamaan kepada sumbernya yang paling otentik yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan, kaum salafi menerapkan model penafsiran yang skriptural atau literal, di mana teks-teks keagamaan dipahami apa adanya, tanpa menggunakan serangkaian metode penafsiran seperti *ta'wil* atau *qiyas* yang kerap digunakan oleh para ulama. Cara pandang tanpa kompromi inilah yang kemudian kelompok salafisme dikategorikan *radikalisme* Islam atau disebut juga dengan salafi radikal.²¹

Paham salafi radikal berkembang di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi Hizbutahrir Indonesia (HTI) suatu organisasi keislaman yang bercorak salafi yang dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi dari Australia sekitar tahun 1980-an. Ia datang ke Indonesia atas undangan K.H. Abdullah bin Nuh untuk mengajar di Pesantren al-Gazali yang berada di Bogor. KH. Abdullah bin Nuh adalah seorang ulama dari Cianjur yang lebih dikenal dengan 'mamak' merupakan seorang ulama, tokoh pendidikan, sastrawan dan pejuang. Mamak sangat gigih menyerukan agar umat Islam berpegang teguh pada syariat Islam dan yang pertama mendukung perkembangan dakwah Hizbut Tahrir di wilayah Cianjur dan Bogor, Jawa Barat.²² Al-Baghdadi memperkenalkan

HT kepada aktivis masjid al-Ghifari, di lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan kemudian berkembang ke luar daerah sampai ke aktivis masjid Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. Dalam perkembangannya, HT Indonesia menerbitkan jurnal bulanan *Al-Wa'ie* dan bulletin mingguan *Al-Islam* yang cukup berpengaruh di tanah air ketika. HT mengajarkan kepada para pengikutnya tentang pentingnya mewujudkan Khilafah Islamiyah.

Organisasi keagamaan yang berperan penting dalam mengembangkan intelektualisme Islam di tanah air adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). DDII adalah lembaga dakwah yang didirikan oleh tokoh tokoh Masyumi setelah pembubaran partai tersebut oleh Soekarno. Untuk menyalurkan semangat perjuangan generasi muda Masyumi maka dikirimlah mereka ke Timur Tengah dengan harapan untuk melanjutkan estafet perjuangan Masyumi nantinya. Para kader DDII setelah selesai menamatkan studinya di Saudi Arabia mereka kembali ke tanah air dengan membawa paham Wahabisme ke daerah asalnya di tanah air. Di Saudi Arabia mereka menuntut ilmu di Universitas Muhammad Ibnu Suud (King Saud University) di Riyadh dan Universitas Islam Madinah di Madinah. Lembaga pendidikan ini memiliki cabangnya di Indonesia yaitu: Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta. Sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang disokong sepenuhnya oleh pemerintah Arab Saudi. Penting dicatat di sini bahwa

pemerintah Saudi memberikan miliaran dolar setiap tahunnya yang disalurkan lewat OKI (Organisasi Konperensi Islam) sebagai beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk kuliah di Timur Tengah. Upaya ini semakin intensif dilakukan pasca Revolusi Iran 1979. Saudi sangat khawatir dengan rencana Iran untuk mengeksport revolusinya ke seluruh dunia Islam.²³

Setelah kembali dari Saudi mereka mengajar di pesantren dan mendirikan, seperti pesantren Al-Mu'min di Ngruki, pesantren Wathaniyah Islamiyah di Kebumen dan pesantren Al-Furqon di Gresik. Pesantren-pesantren tersebut mempunyai karakter pendidikan modern. Kurikulumnya ditekankan pada pengajaran bahasa Arab, teologi Islam dan hukum Islam. Para alumni Saudi Arabia ini berkomitmen untuk menyebarkan Wahabi di bawah panji gerakan dakwah Salafi. Mereka berpendapat bahwa umat Islam Indonesia butuh pemahaman Islam yang sejati sebagaimana di praktekkan *salafush shaleh*.

Selain dari Saudi Arabia, ajaran Salafi yang masuk ke Indonesia juga berasal dari Kuwait. Dua negara kaya minyak tersebut merupakan sumber utama pendanaan bagi kelangsungan aktivitas gerakan Salafi. Menurut Zaki Mubarak perkembangan gerakan Salafi di Indonesia mendapat dukungan ditandai dengan kedatangan para tokoh intelektual Arab Saudi, Kuwait dan Yaman. Beberapa tahun belakangan gerakan Salafi bermunculan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jakarta, Banten, Jawa Barat/Bogor,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan. Ciri-ciri mereka, terutama para kaum lelakinya mengenakan gamis, bercelana panjang di atas mata kaki dan memelihara jenggot. Bagi perempuannya berpakaian gamis warna hitam, warna abu-abu, warna coklat dan memakai cadar²⁴.

Di Bogor paham salafi dikembangkan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, seorang ustadz dan tokoh Salafi yang cukup terkenal di Indonesia yang tinggal di Bogor. Ustadz Yazid Jawas, mendirikan Pesantren Imam Ahmad dan Yayasan Minhajus Sunnah di Ciawi, Bogor. Selain itu ada juga Abu Qatadah yang berasal dari Tasikmalaya dan tinggal di Tasikmalaya, ia lulusan dari Yaman dan memiliki Pesantren Ihya As-Sunnah, ia mengajar di masjid-masjid yang ada di Jakarta.

Beberapa alumni Saudi lainnya yang tinggal di sekita Bogor ialah Syaikh Mudrika Ilyas pimpinan Pesantren Al-Ma'had Bermanhaj di Kabupaten Bekasi. Begitu pula dengan Abdul Hakim keturunan Arab dan tinggal di Poltangan III Pasar Minggu, Jakarta. Sementara di Jakarta ada Firdaus Sanusi, Abu Haidar, Abu Lukman, Ali Subana; Syakh Mudrika Ilyas Lc, Mudir Al-Ma'had, Abu Islama Imanuddin Lc, Ali Saman Hasan Lc sebagai pendiri dan pengasuh Sekolah Dasar Islam (SDI) An-Najah yang berlokasi di Jl. Raya Pos Pengumben Kelurahan Srengseng Jakarta Barat. Para alumni salafi satu dengan lainnya saling berkomunikasi dalam rangka pengembangan jaringan keintelektualan dan dakwah mereka, seperti yang dilakukan oleh Abu Fairuz

di Batam, Kumai di di Lombok, Abu Nida' tinggal di Yogyakarta, Ahmad Faiz Asifuddin tinggal di Solo; Muhamad Umar As Sewed tinggal di Solo. Sementara di Cileungsi Paham salafi dikembangkan oleh Badrussalam. Tepatnya di mushalla al Barkah Kampung Tengah dikenal sebagai daerah pergerakan Muhammadiyah sejak tahun 80-an. Kehidupan dakwah di Kampung Tengah mulai berubah setelah Badrussalam kembali ke tanah air usai menyelesaikan pendidikannya Universitas Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah, Saudi Arabia pada tahun 2001. Ia mengembangkan dakwah dengan mendirikan radio Rodja yang menjadi rujukan radio salafi di tanah air sampai sekarang ini.²⁵

Kembali kepada syariat bagi beberapa kelompok Islam radikal dipandang sebagai solusi dalam memecahkan krisis multidimensi yang sedang terjadi, dengan menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dianggap mampu menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Kelompok gerakan pendukung syariat Islam ini melakukan demonstrasi dengan menyuarakan dimasukkannya tujuh kata "*dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" pada Piagam Jakarta ke dalam UUD 45 dan menuntut daerah-daerah diberi kewenangan untuk menentukan aturan-aturan dan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi syariat Islam.

Pada kesempatan lain, gerakan radikal ini nyaring menyuarakan "*amar ma'ruf nahi munkar*" terhadap

bentuk-bentuk perilaku sosial masyarakat yang tidak mencerminkan atau menyimpang dari ajaran syariat Islam. Dalam beberapa bentuknya kemunculan gerakan islam ini sangat provokatif dan menjadi momok yang menakutkan. Dalam berbagai aksinya, dengan membawa senjata tajam, mereka menghancurkan tempat-tempat yang dianggap sarang maksiat. bar, café, diskotik, pub, karaoke, dan lain sebagainya, menjadi sasaran utama aksi-aksi mereka. Pada tingkat ormas, organisasi Gerakan Islam yang melakukan gerakan tersebut misalnya Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Hizbut at-Tahrir Indonesia, Forum Komunikasi Ahlusunnah Waljamaah (FK-ASWJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Jamaah Islamiyah (JI), Laskar Jihad, dan lainnya.

Sementara pada konteks politik, tuntutan untuk melembagakan syariat Islam juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK). Alasan dari ketiga partai ini mendukung syariat Islam bahwa penduduk Indonesia mayoritas Muslim, untuk menjamin ketenangan hidup umat Muslim perlu diberlakukan syariat Islam yang didukung dengan konstitusi negara.²⁶

Sementara itu di tingkat daerah, Perubahan pengelolaan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi melalui Undang-Undang No. 44 1999 dan Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2000 tentang otonomi daerah, telah memberi peluang pula kepada daerah

untuk menerapkan syariat Islam. Yang menarik adalah, kebijakan otonomi daerah (otda) dimanfaatkan untuk melegitimasi pelaksanaan syariat Islam. Awalnya, hanya Aceh yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah RI, daerah-daerah lain seperti Kabupaten Cianjur,²⁷ Bulukumba, Sumatera Barat menyusul mengeluarkan Perda pemberlakuan syariat Islam, walaupun itu tanpa persetujuan dari pemerintahan pusat. Situasi seperti ini pernah diramalkan oleh William Liddle, bahwa dalam iklim politik yang lebih terbuka, ekspresi Islam yang lebih formalistik akan muncul, mengingat mereka memiliki banyak sumber daya politik dalam usaha mendiseminasikan isu dan tuntutan mereka melalui organisasi, media, dan akses mereka terhadap para politikus.²⁸

Bahkan, pendidikan agama juga terpapar paham radikalisme keagamaan. Bila diperhatikan secara seksama beberapa peristiwa peledakan bom yang terjadi di tanah air yang melibatkan anak-anak usia sekolah cukup mengkhawatirkan. Dengan terlibatnya anak-anak usia sekolah dalam pelaku bom bunuh diri merupakan persoalan yang sangat mengancam institusi pendidikan. Menurut penelitian Sidney Jones (2007), arus radikalisme masuk ke sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam (rohis) yang dikembangkan para alumni yang kuliah di perguruan tinggi. Fakta ini juga telah diamini oleh Wakil Kementerian Pendidikan Nasional, Dr. Fasli Jalal, bahwa adanya kecenderungan eksklusifisme keagamaan di sekolah

umum baik di dalam kelas maupun dalam kegiatan ekstra kurikuler perlu diwaspadai oleh sekolah.²⁹

Menguatnya radikalisme keagamaan di sekolah juga ditunjukkan dengan meningkatnya sikap intoleran di kalangan para guru. Menurut hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada tahun 2008, (62,4%) guru menyatakan keberatan jika kelompok agama lain yang berbeda dari agama responden menjadi pejabat di negeri ini, apakah itu sebagai presiden, gubernur ataupun bupati. Sikap yang sama berlaku pula (68,6%) jika pemeluk agama yang berbeda tadi menjadi kepala sekolah. Tingginya sikap intoleran ini semakin melonjak dengan ketidaksediaan responden (73,1%) jika pemeluk agama yang berbeda tadi membangun tempat peribadatan.

Global Jihad dan Terorisme Keagamaan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh PPIM-UIN Jakarta 2005, bahwa faktor perlawanan terhadap Barat disebabkan karena perlakuan tidak adil yang dirasakan umat Islam. Bahwa Amerika seringkali menyuarakan demokrasi dan penegakan nilai-nilai Hak-hak asasi manusia (HAM) untuk perdamaian dunia, akan tetapi yang terjadi sebaliknya. Survey ini menunjukkan terhadap mereka yang menyatakan sangat setuju (9%), dan setuju (37%). Sementara itu pendapat yang menyatakan tidak setuju (40%), dan sangat tidak setuju (4%). Mereka yang menyatakan tidak tahu mengenai hal ini

sebanyak (10%). Jika diakumulasikan hasil survey ini, maka pendapat yang menyatakan setuju bahwa Umat Islam diberlakukan tidak adil (46%), sebaliknya yang menyatakan tidak setuju bahwa umat Islam diperlakukan tidak adil (44%), dan tidak tahu (10%).³⁰ Ketika didalami lebih jauh dalam penelitian kualitatif, dibalik rasa ketidakadilan yang memunculkan sikap dan tindakan perlawanan dari umat Islam memiliki alasan, berikut ini beberapa kutipan wawancara, adapun alasan informan melakukan perlawanan adalah sebagai berikut,

*“tuduhan Amerika terhadap kelompok radikal Islam sebagai agen terorisme belum terbukti, oleh karena itu tindakan yang dilakukan Amerika terhadap Irak dan Afghanistan merupakan suatu bentuk kezaliman yang sangat tidak berdasar”.*³¹

*“Jika kata terorisme dikaitkan dengan teror, sesungguhnya yang melakukan teror terhadap Irak dan Afghanistan adalah Amerika. Amerika merupakan negara yang suka mengancam dan membangkitkan kebencian kepada semua negara-negara Muslim”.*³²

Jika kita mencermati kutipan wawancara di atas, sikap dan tindakan kaum muslim dapat dipahamai memiliki latarbelakang tertentu untuk melakukan tindakan jihad. Jihad diidentikan dengan gerakan perlawanan—dalam berbagai bentuknya—terhadap negara-negara dan kepentingan-kepentingan Barat. Membebaskan diri dari penjajahan Eropa di negara-negara Islam, atau yang mayoritas penduduknya Muslim. Radikalisme dan ekstremisme yang

dipoles dengan semangat dan doktrin-doktrin jihad melahirkan jihadisme.

Dalam Islam memang diajurkan untuk berjuang, berperang (*harb*) dan menggunakan kekerasan terhadap para penindas dan tidak mau hidup berdamai dengan Islam. Misalnya dalam surat al Baqarah ayat 190-191; 216-217. Bahkan merupakan kewajiban bagi kaum muslim untuk menegakkan kebaikan dan melawan kemungkaran (*amru ma'ruf nahy munkar*) sebagai tindakan pembelaan diri (defensive) bukan agresif. Sejauh memiliki muatan moral maka jihad dibolehkan dalam Islam. Namun jika dilakukan dengan kekerasan apalagi teror merupakan tindakan teror bahkan dapat dikatakan berbuat ketidakadilan dan kezaliman (*adil dan zalim*). Banyak klaim jihad yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki muatan moral didalamnya yang kemudian melahirkan (*islamic terorisme*) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan dapat merusak citra Islam sebagai agama damai yang memberi rahmat kepada semesta alam.

Terorisme Keagamaan

Secara etimologis, kata *teror* sendiri merupakan akar dari kata terorisme, yang diambil dari bahasa latin yakni *terrere*, yang artinya membuat seseorang gemetar atau merasa ngeri karena ketakutan. Menurut riwayatnya, kata teror menjadi populer ketika terjadi Revolusi Perancis pada 1789 maka oleh karena itu mengandung muatan politik di dalamnya. Pada prakteknya teror seringkali dilakukan dengan kekerasan

untuk menciptakan ketakutan terhadap lawannya. Penambahan kata *isme*, merujuk pada sebuah perilaku dan sikap yang menggunakan metode kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuannya.³³

Selain itu, terorisme juga dimaknai sebagai tindakan kekerasan yang dilandasi pemikiran dan taktik sistematis untuk tujuan politik tertentu. Tindakan kekerasan yang tidak dilandasi pemikiran dan taktik sistematis tidaklah bisa disebut terorisme. Ia hanya tindakan kekerasan biasa. Adanya pemikiran dan taktik sistematis menjadi hal mendasar dalam terorisme.³⁴ Tujuannya berkait dengan upaya-upaya mengubah sistem dan tatanan politik yang berlaku secara menyeluruh. Kekerasan tersebut melahirkan efek kekacauan dan ketakutan yang dirancang untuk maksud mempengaruhi masyarakat berhadapan dengan penguasa yang dianggap bertanggungjawab di balik sebuah kebijakan.

Literature studi terorisme sendiri juga cukup beragam. Tidak semua ilmuwan politik Islam sepakat dengan penggunaan kata terorisme untuk gerakan Islam. John L. Esposito, berpandangan bahwa fenomena gerakan islam tidak tepat disebut sebagai gerakan *fundamentalisme* ataupun *terorisme*. Menurutnya, kata kata ini terlalu dibebani oleh praduga “Kristen dan stereotip Barat. Maka oleh karena kata yang lebih pas untuk gerakan islam adalah “Kebangkitan Islam (revivalisme Islam) atau “Aktivisme Islam”, menurutnya kata ini

lebih lebih mengakar dalam tradisi Islam.³⁵

Sementara itu, menurut Azra, dengan mengutip Richard Falk (1988), terorisme adalah setiap tindakan kekerasan politik yang tidak memiliki justifikasi moral dan hukum, apakah tindakan kekerasan itu dilakukan suatu kelompok revolusioner atau pemerintah/negara.³⁶ Menurut Azra, Islam bertentangan dengan terorisme karena prinsip prinsip Islam mengajarkan keadilan, perdamaian, dan kehormatan. Setiap perjuangan untuk menegakkan nilai nilai tersebut dilakukan dengan lemah lembut dan mengandung *rahmatan lil alamin*. Kalaupun ada tindakan kekerasan politik yang dilakukan perjuang Palestina terhadap Israel, itu diletakkan dalam kerangka moral, melawan teroris Israel untuk menegakkan negara Palestina.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa munculnya gerakan Islam memiliki latar belakang yang beragam, yakni ketidakpuasan politik lokal—global, keterpinggiran, dan semacamnya—nampaknya menjadi alasan utama munculnya gerakan Islam. Agama pada tahap awal bukanlah pemicunya. Namun demikian, ketika kelompok telah terbentuk, agama menjadi faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting. Maka oleh karena itu, agak rumit memposisikan radikalisme dan terorisme terhadap umat Islam. Karena radikalisme dan terorisme hampir selalu muncul tidak hanya Islam tetapi

juga Kristen, Komunisme, Sosialisme, dan Liberalisme. Dalam pandangan Islam, tindakan-tindakan perlawanan juga memiliki argumentasi dan legitimasinya sendiri. Sikap bijak yang bisa dilakukan adalah bersikap hati-hati dan bersikap objektif dalam menyikapi fenomena kebangkitan Islam dalam konteks *antagonist* dan *protagonis* serta kelompok-kelompok yang diuntungkan (*bystander*) dalam perseteruan itu.

Jika demikian halnya, sekali lagi kita mungkin menjadi semakin paham mengapa fenomena seperti yang kita lihat di Amerika Serikat pada 11 September 2001 dan fenomena kekerasan oleh FPI dan Laskar Jihad di Indonesia dapat terjadi. Kaum fundamentalis merasa bahwa mereka sedang berperang melawan kekuatan yang mengancam nilai-nilai yang paling sakral. Namun demikian, bila tindakan perlawanan yang dilakukan dengan kekerasan dan tidak bertanggung jawab yang kemudian menimbulkan rasa ketakutan (teror) tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Yang sesungguhnya itu bisa ditempuh dengan jalan damai dan lebih beradab.***

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Azim Ramadan, "Fundamentalist Influence in Egypt: The Strategies of Muslim Brotherhood and the Takfir Group", dalam Martin E. Marty dan R. Scott Appleby (ed.), *Fundamentalisms and the State: Remaking Politics, Economies, and Militance* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1993), hal. 152.
- Armstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*, Jakarta: Mizan, 2001, hal. ix.
- Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar Peradaban : Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 80.
- Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 107-127.
- Charles Kuzman, Structural Opportunity and Perceived Opportunity in Social Movement theory: The Iranian Revolution of 1979, dalam *Social Movement: Reading on Their Emergence, Mobilization, and Dynamic*, 1997, California, Roxbury Publishing Company, page 66-80.
- Esposito, John L., *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, edisi Indonesia, *Ancaman Islam: Mitos atau realitas?*, Jakarta: Mizan, 1994, hal. 1
- Gamson, William, A. 1992. *Talking Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, Norhaidi, 2008. *Laskar Jihad, Islam, Militas, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Horace M. Kallen, "Radicalism", dalam Edwin R.A. Seliman, *Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. XIII-XIV (New York: The Macmillan Company, 1972) halaman 51-54.
- Huntington, Samuel P. 1997. *The Clash of Civilizations. Remaking of the*

- World Order*. New York: Simon and Schuster.
- Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004.
- Kartodirjo, S, *Pemberontakan Petani Banten, Pustaka Jaya*, Jakarta, 1984
- Lapidus, Ira, M., *Islamic Political Movement: Patterns of Historical Change dalam Edmund Burke III dan Ira M. Lapidus*, (ed), *Islam, Politics, and Social Movement*. Barkeley: University of California Press, 1988.
- Lubis, H. Nina, Prof. Dr. Hj, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*, pen. Pemprov. Jawa Barat, tanpa tahun.
- Marty, Martin E., R. Scott Appleby, (eds.), *Fundamentalisms Comprehended* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1995).
- Mc.Adam, Doug and A. Snow David, *Social Movements: Readings on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics*, (California, Roxbury Publishing Company: 1997)
- Mohammad Kodari, *Syariat Islam Dalam Aras Wacana Publik: Tanggapan untuk Alfan dan Khamami dalam Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Pen. Yayasan Paramadinahal, ed. Kurniawan Zen, cet. I, hal. 87.
- Mubarok, Muhamad Zaki, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.
- Muzani, S, *Syariat Islam Bergerak: Budaya, Psikologi, Pilihan Rasional, Oraganisasi, Struktur Kesempatan Politik, dan Gerakan Islam Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM-UIN) Jakarta, (tidak diterbitkan), 2002
- Parson, T, *Analytical Functionalism*, dalam *The Structural of Sociological Theory*, Jonathan Turner, University of California, Riverside, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1991.
- Popper, K. R, *The Open Society and its Enemies*, London GEORGE ROUTLEDGE & SONS, LTD. BROADWAY HOUSE: 68-74 CARTER LANE, E.G.
- Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Jaringan Islam Liberal (JIL), Jakarta 2003, cet. pertama, Penerbit, Sembrani Aksara Nusantara
- Silke, Andrew. "An Introduction to Terrorism Research," dalam *Research on Terrorism: Trends, Achievements and Failures*, ed. Andrew Silke. London: Frank Cass, 2004.
- Taher, Tarmizi,...[etal]; Ed. Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama*, Jakarta, PPIM Jakarta, 1998, hal 1-44.
- Tasman, "Al-Radikaliyah al-Islamiyyah: Afkaruha wa kharakatuha fi Indunisia al-Mu'sir" (*Islam Radikal: Pemikiran dan Gerakan di Indonesia*), jurnal STUDIA ISLAMIKA, Jurnal Studia Islamika, vol. 16, No. 1, 2009 ISBN:

- 0215-0492. SK Kemenristek DIKTI No.32a?E/KPT/2017
- dan Dita Kirana, “Rodja: Rujukan Radio Salafi di Indonesia” dalam *Suara Salafi di Udara*, Ed. Din Wahid dan Jamhari Ma’ruf.
- ...,”*Dhâhirah Harakah Tathbîq al-Shari’ah al-Islamiyah bi Shianjûr: Dirâsah Tamhîdiah*”, Studia Islamika, Volume 12, Number 2, 2005. PPIM UIN Jakarta, ISBN: 0215-0492. SK Kemenristek DIKTI No.32a?E/KPT/2017.
-, “Doktrin Gerakan Islamis, Adil dan Zalim”, dalam, *Benturan Peradaban, Sikap dan perilaku Islamis terhadap Amerika*, Mujani, Saiful dan Jajat burhanudin, PPIM UIN Jakarta dan Freedom Institute, 2005. Hal. 103-115.
- Tempo, Koran , 21 April 2011.
- Wiktorowicz, Q, *Aktivisme Islam, Pendekatan Teori Gerakan Sosial*, Balitbang dan Diklat, Departemen Agama, Jakarta, 2007, hal. 39-44.

Catatan Kaki:

¹ Lihat, Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*, Jakarta: Mizan, 2001, hal. ix.

² Tasman, "Al-Radikaliyah al-Islamiyyah: Afkaruha wa kharakatuha fi Indunisia al-Mu'sir" (*Islam Radikal: Pemikiran dan Gerakan di Indonesia*), jurnal STUDIA ISLAMIKA, Jurnal Studia Islamika, vol. 16, No. 1, 2009 ISBN: 0215-0492. SK Kemenristek DIKTI No.32a?E/KPT/2017

³ McAdam, Doug and A. Snow David, *Social Movements: Readings on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics*, (California, Roxbury Publishing Company: 1997)

⁴ Parson, T, Analytical Functionalism, dalam *The Structural of Sociological Theory*, Jonathan Turner, University of California, Riverside, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, 1991.

⁵ Tarrow, Sidney, *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*. Cambridge: Univesity Press.

⁶ Gamson, William, A. 1992. *Talking Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.

⁷ Wiktorowicz, Q, *Aktivisme Islam: Pendekatan Teori Gerakan Sosial (Islamic Activism: A Social Movement Theory Aproach)*, Balitbang dan Diklat, Departemen Agama, Jakarta, 2007, hal. 39-44.

⁸ Huntington, Samuel P. 1997. *The Clash of Civilizations. Remaking of the World Order*. New York: Simon and Schuster.

⁹ Ira. M. Lapidus, *Islam, Politics, and Social Movements*, Edited by Edmund Burke and Ira M. Lapidus, University of California Pers, 1999, hal. 15-16.

¹⁰ John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, edisi Indonesia, *Ancaman Islam: Mitos atau realitas?*, Jakarta: Mizan, 1994, hal. 1

¹¹ Saiful Muzani, *Syariat Islam Bergerak: Budaya, Psikologi, Pilihan Rasional, Oraganisasi, Struktur Kesempatan Politik, dan Gerakan Islam Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM-UIN) Jakarta, (tidak diterbitkan), 2002

¹² Lapidus, Ira, M., *Islamic Political Movement: Patterns of Historical Change dalam Edmund Burke III dan Ira M. Lapidus, (ed), Islam, Politics, and Social Movement*. Barkeley: University of California Press, 1988.

¹³ Charles Kuzman, *Structural Ooportunity and Perceived Ooportunity in Social Movement theory: The Iranian Revolution of 1979*, dalam *Social Movement: Reading on Their Emergence, Mobilitation, and Dynamic*, 1997, California, Roxbury Publishing Company, page 66-80.

¹⁴ Popper, K. R, *The Open Society and its Enemies*, London GEORGE ROUTLEDGE & SONS, LTD. BROADWAY HOUSE: 68-74 CARTER LANE, E.G.

¹⁵ Kartodirjo, S, *Pemberontakan Petani Banten, Pustaka Jaya*, Jakarta, 1984

¹⁶ Horace M. Kallen, "Radicalism", dalam Edwin R.A. Seliman, *Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. XIII-XIV (New York: The Macmillan Company, 1972) halaman 51-54.

¹⁷ Taher, Tarmizi,...[etal]; Ed. Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, *Radikalisme Agama*, Jakarta, PPIM Jakarta, 1998, hal 1-44.

¹⁸ Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 107-127.

¹⁹ Lihat, Abdel Azim Ramadan, "Fundamentalist Influence in Egypt: The Strategies of Muslim Brotherhood and the Takfir Group", dalam Martin E. Marty dan R. Scott Appleby (ed.), *Fundamentalisms and the State: Remaking Polities, Economies, and Militance* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1993), hal. 152.

²⁰ Marty, Martin E., R. Scott Appleby, (eds.), *Fundamentalisms Comprehended* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1995).

²¹ Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004.

²² Lubis, H. Nina, Prof. Dr. Hj, *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*, pen. Pemprov. Jawa Barat, tanpa tahun.

²³ Nurhaidi Hasan, 2008. *Laskar Jihad, Islam, Militas, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia dan KITLV-Jakarta.

²⁴ Muhamad Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.

²⁵ Tasman dan Dita Kirana, "Rodja: Rujukan Radio Salafi di Indonesia" dalam

Suara Salafi di Udara, Ed. Din Wahid dan Jamhari Ma'ruf.

²⁶ Mohammad Kodari, *Syariat Islam Dalam Aras Wacana Publik: Tanggapan untuk Alfan dan Khamami dalam Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Pen. Yayasan Paramadinahal, ed. Kurniawan Zen, cet. I, hal. 87.

²⁷ Tasman, "Dhâhirah Harakah Tathbîq al-Shari'ah al-Islamiyah bi Shianjûr: Dirâsah Tamhîdiah", *Studia Islamika*, Volume 12, Number 2, 2005. PPIM UIN Jakarta, ISBN: 0215-0492. SK Kemenristek DIKTI No.32a?E/KPT/2017.

²⁸ Arskal Salim dan Azyumardi Azra, *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Jaringan Islam Liberal (JIL), Jakarta 2003, cet. pertama, Penerbit, Sembrani Aksara Nusantara

²⁹ Koran Tempo, 21 April 2011.

³⁰ Tasman, Doktrin Gerakan Islamis, Adil dan Zalim, dalam, *Benturan Peradaban, Sikap dan perilaku Islamis terhadap Amerika*, Mujani, Saiful dan Jajat

burhanudin, PPIM UIN Jakarta dan Freedom Institute, 2005. Hal. 103-115.

³¹ Wawanra dengan Ismail Yusanto, Sekjen Hizbuttahrir Indonesia di Jakarta, 2004

³² Wawancara dengan Irfan S. Awwas, Ustadz, Jogjakarta, 2004.

³³ Ropi, Ismatu, Fenomena Terorisme, Perspektif Sejarah, Politik dan Gerakan, dalam *Memahami Terorisme; Sejarah, Konsep, dan Model*, Jajang jahroni dan Jamhari Makruf, PPIM UIN Jakarta, 2016.

³⁴ Silke, Andrew. "An Introduction to Terrorism Research," dalam *Research on Terrorism: Trends, Achievements and Failures*, ed. Andrew Silke. London: Frank Cass, 2004.

³⁵ Esposito, John, L, Ancaman islam: Mitos atau Realitas, Mizan, Bandung, 1996.

³⁶ Azra, Azyumardi, Konflik Baru Antar Peradaban : Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas, Rajawali Press, Jakarta, hal. 80.